



# Buletin Parlementaria

Nomor 1126/III/X/2020 • Oktober 2020



## Finalisasi UU Cipta Kerja Tak Ubah Substansi



**3** Bahas Aturan Turunan  
UU Cipta Kerja, Kelompok  
Buruh Harus Digandeng



**6** Komisi III Apresiasi  
Kinerja Polda Kalsel  
Berantas Narkoba



9 772614 339005



# Finalisasi UU Cipta Kerja Tak Ubah Substansi

**W**akil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menjamin tidak ada pasal yang diselundupkan selama proses koreksi draf Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Ia menjelaskan, jika terdapat penambahan pasal atau ayat dalam UU Cipta Kerja yang telah disetujui pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan dapat dipidana.

"Saya jamin sesuai jabatan saya dan rekan-rekan (Anggota) di sini, tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukan selundupan pasal. Itu sumpah jabatan kami. Karena itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal," tegas Azis saat konferensi pers di di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10). Turut hadir Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Pimpinan Fraksi DPR RI dan Anggota Baleg DPR RI.

Menjawab kesimpangsiuran mengenai jumlah halaman UU Cipta Kerja, Azis menegaskan bahwa draf final UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman. Dengan rincian, sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang dan selebihnya merupakan penjelasan.

"Kalau sebatas UU Cipta Kerja, hanya 488 halaman, kemudian ditambah penjelasan menjadi 812 halaman. Sehingga menjawab simpang siur jumlah halaman, ada yang seribu sekian, sembilan ratus sekian. Secara resmi kami lembaga DPR RI, berdasarkan laporan dari Bapak Sekjen DPR RI (Indra Iskandar), *netting* jumlah halaman sebanyak 812 halaman," tegas Azis.

Dalam konferensi pers tersebut, Azis menjelaskan mengapa bisa terjadi perbedaan jumlah halaman dalam draf UU Cipta Kerja yang diserahkan oleh Baleg pada Rapat Paripurna dengan



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin saat konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Foto: Suci/OD

naskah resmi. Azis menyebutkan perbedaan jumlah halaman terjadi setelah melalui proses perbaikan, DPR RI melakukan koreksi terhadap kesalahan ketik atau pengulangan kata.

"Mengetahui jumlah halaman, itu adalah mekanisme pengetikan dan editing termasuk ukuran kertas. Proses yang dilakukan di Baleg DPR RI itu menggunakan kertas biasa (ukuran A4), tapi pada saat sudah masuk dalam Tingkat-II, proses pengetikannya di kesetjanaan menggunakan ukuran *legal paper* yang sudah menjadi syarat ketentuan dalam UU," papar Azis.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan, substansi UU Cipta Kerja tidak ada yang berubah dari yang telah diputuskan di Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu.

Adapun, sepanjang perubahan yang dilakukan sebatas koreksi berbagai kemungkinan adanya kesalahan penulisan, struktur bahasa dan struktur penempatan pasal sesuai dengan mekanisme UU Nomor 12 Tahun 2011.

"Hal terpenting, jangan lupa bahwa UU Ciptaker ini terkait dengan kemudahan perizinan sesuai cita-cita reformasi birokrasi. Kita tinggal berharap, kalau Pemerintah bisa mengimplementasikan apa yang telah tertuang dalam UU Ciptaker ini, maka saya yakin Indonesia akan jauh lebih maju," pungkas Supratman. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar secara resmi menyerahkan draf final UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (14/10). ■ rmm/es

# Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Kelompok Buruh Harus Digandeng

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.

“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan dalam rilisnya, Kamis (8/10).

Puan menegaskan, DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh diantaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan,

tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja. “DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” ungkap Puan.

Puan memastikan, DPR RI melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU pada 5 Oktober 2020. Pembahasannya pun dilakukan transparan dan terbuka, serta dapat disaksikan masyarakat melalui siaran di laman DPR RI.

Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja, kata Puan, DPR RI membentuk Tim Perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah. “UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik,” ungkapnya.

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu menegaskan, DPR RI akan mengawasi penerapan UU Cipta Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila undang-undang itu dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat undang-undang tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” tutup politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. ■/hs/es



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Gerald/OD



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindy, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indrianti, Mohammad Rizki Nugraha.

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

**ANALIS MEDIA**  
Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

**PENERBITAN**  
**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E., Barliansyah, Fathurahman

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



# Pilkada Harus Terapkan Prokes secara Ketat

**K**omisi II DPR RI mengapresiasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 di Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan semua tahapan Pilkada serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal itu disampaikan Doli saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Badung, Bali, Senin (12/10). Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan persiapan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. Hadir dalam kunjungan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Kementerian ATR/BPN RI.

“Secara umum di Bali, khususnya Kabupaten Badung kita nilai cukup baik ya dalam melakukan persiapan menghadapi Pilkada serentak tahun

2020 ini. Saya kira program dan langkah-langkah atau kebijakan yang diambil sudah cukup baik dan melibatkan seluruh *stakeholder*,” kata Doli.

Ia juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung bersama Forkopimda, Kepolisian, TNI untuk melibatkan masyarakat adat dalam penanganan Covid-19. “Jadi bukan hanya Pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat desa adat bahkan sampai melibatkan pecalang kemudian ada program misalnya membuat di setiap desa ada beberapa tempat cuci tangan. Saya kira sejauh ini cukup baik,” katanya.

“Kami berharap ini tetap terjaga dan semoga ini menjadi sebuah contoh bagi kabupaten/kota lain di Indonesia dalam pelaksanaan aturan dan program pemerintah baik dalam penanganan pandemi Covid-19 maupun pelaksanaan pilkada serentak,” jelas politisi dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) itu.

Kendati dilaksanakan di tengah pandemi, tambah legislator dari Sumatera Utara III itu, pelaksanaan Pilkada harus tetap terjaga kualitasnya, terutama dari sisi partisipasi pemilih tetap bisa meningkat atau setidaknya sama dari Pilkada serentak sebelumnya.

Karena itu, Komisi II DPR RI berharap penyelenggara Pilkada yang perlu memastikan seluruh tahapan Pilkada dipersiapkan secara sungguh-sungguh agar dapat berjalan sukses dengan memenuhi tiga indikator, yaitu semua tahapan bisa berjalan sesuai peraturan yang ada, partisipasi pemilih tinggi, dan masyarakat aman dari Covid-19.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Badung, Lihadnyana mengatakan Pemkab Badung beserta pihak TNI, Kepolisian, dan instansi terkait begitu juga dengan masyarakat baik dinas dan adat secara bersama-sama dan bergandengan tangan bahu membahu dalam mencegah dan melawan Covid-19 ini. “Kami ingatkan dengan penanganan serius dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang taat oleh semua pihak, baik itu masyarakat di perkotaan dan di desa niscaya pandemi Covid-19 dapat diatasi,” tegas Lihadnyana kepada Komisi II DPR RI.

Pihaknya juga berharap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Badung di tengah pandemi ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan dan harapan bersama, serta angka yang terjangkit dan yang terdampak Covid-19 dapat menurun. “Hal penting yang juga menjadi perhatian kami adalah bagaimana agar pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Badung ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses disertai dengan penurunan kasus Covid-19, sehingga kasus Covid-19 bisa ditekan seminimal mungkin,” katanya. ■ ann/sf



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bertukar cenderamata dengan jajaran Pemkab Badung dan mitra kerja saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Badung, Bali. Foto: Anne/OD



# Balitsa Lembang Diminta Penuhi Kebutuhan Bibit Masyarakat



Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meninjau produk yang dihasilkan Balitsa Lembang, Jabar. Foto: Jaka/OD

**B**alai Penelitian Tanaman Sayur (Balitsa) Kementerian Pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, memiliki fungsi yang paling utama menyiapkan benih untuk pengembangan dunia pertanian. Namun, selama ini pemenuhan bibit untuk dibagikan ke masyarakat masih mengandalkan pihak ketiga. Hal ini mendapat sorotan dari Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI.

“Menurut saya ini ada kelucuan.

Satu sisi (Kementan) punya Litbang, tapi kalau untuk memberi bantuan bibit ke masyarakat kita beli lagi ke pihak ketiga. Artinya, buat apa ada Litbang kalau kemudian bibit jagung, kambing, ayam, masih beli lagi keluar. Kalau begitu swasta saja yang menyelenggarakan, kita tinggal beli saja, mari *mindset*-nya mulai sekarang kita ubah,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI mengunjungi Balitsa Lembang, di KBB, Jabar, Rabu (14/8).

Dedi menambahkan, jika *mindset* ini diubah, tentu akan memberikan efisiensi anggaran di Kementan. Ke depan, masih kata Dedi, pihaknya ingin mendorong pengembangan badan penelitian ini dengan satu komitmen harus memenuhi kebutuhan benih untuk masyarakat. Dengan begitu, jumlah area lahan Balitsa ini diperluas, tentu dapat berimplikasi peningkatan jumlah orang-orang yang dipekerjakan.

“Bagi masyarakat lembang bekerja mendapatkan upah Rp 60-80 ribu per hari itu sangat berarti. Kenapa? Karena kebanyakan yang bisa dikerjakan masyarakat di sini seperti mencangkul, babat dan merawat tanaman, selain itu mereka mau dapat darimana,” tanya mantan Bupati Purwakarta ini. Ia melanjutkan, regulasi perputaran uang di masyarakat ini harus terus berjalan, karena ini akan mengamankan perekonomian masyarakat.

“Ketika harga cabe, tomat dan lainnya jatuh, masih ada areal bergerak untuk ditanami oleh masyarakat. Karena kami paham bahwa dari sekian puluh ribu areal ini punya perorangan. Probleminya di sini kan area pertanian hortikultura, kalau harga pertanian jatuh, mau simpan dimana (hasil panennya)? Seandainya pertanian seperti padi kan masih bisa disimpan dalam waktu yang lama,” analisa politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut legislator dapil Jabar VII itu, Balitsa Lembang harus bekerjasama dengan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga seluruh produktifitasnya memiliki implikasi terhadap penyebaran dan pertumbuhan dunia pertanian dan peternakan bagi masyarakat, bukan hanya bangga terhadap hasil penelitian. ■ jk/sf

# Komisi III Apresiasi Kinerja Polda Kalsel Berantas Narkoba

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengapresiasi

setinggi-tingginya prestasi Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Ia berjanji mendukung penambahan anggaran yang diperlukan Polda Kalsel dalam peningkatan kinerja ke depan.

Desmond menyatakan, komitmen Kapolda Kalsel Irjen Pol. Nico Afinta beserta jajaran dalam memberantas peredaran narkoba kelas kakap yang menggempur Bumi Lambung Mangkurat selama ini terlihat jelas dengan terungkapnya upaya penyelundupan 300 kilogram sabu-sabu asal Malaysia pada 6 Agustus 2020 lalu.

“Kinerja Polda Kalsel yang kami lihat sangat lebih baik dari pada sebelumnya dalam hal pencegahan, penegakan hukum maupun pendekatan di tengah masyarakat,” ujar Desmond, usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalsel beserta jajaran, di Mapolda Kalsel, Banjarmasin, Senin (12/10).

Oleh sebab itu, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa Komisi III DPR RI tak ragu dalam mendukung setiap usulan Kapolda Kalsel. Termasuk, berkaitan dengan rencana pembangunan Gedung Polda Kalsel di Kota Banjarbaru.

“Ini jadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rangka usulan anggaran ketika kebijakan rapat dengan Kapolri. Kemudian, pembangunan lain yang sifatnya menunjang personel Polda Kalsel dipastikan didukung sepenuhnya oleh wakil rakyat di tingkat pusat agar

”

**KINERJA POLDA KALSEL YANG KAMI LIHAT SANGAT LEBIH BAIK DARI PADA SEBELUMNYA DALAM HAL PENCEGAHAN, PENEGAKAN HUKUM MAUPUN PENDEKATAN DI TENGAH MASYARAKAT**

disetujui dalam keputusan anggarannya oleh Pemerintah,” tandas legislator dapil Banten II itu.

Menutup pernyataannya, Desmond menyatakan Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja masa reses ini selain menyerap aspirasi Polda Kalsel, juga bertemu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di samping upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang juga terus dilakukan secara maksimal. ■ *opi/sf*

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa.  
Foto: Dok/MAN





# Kelebihan Kapasitas Lapas Harus Jadi Perhatian Serius

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menilai pelayanan Keimigrasian di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur (Jatim) sudah cukup baik dan bagus. Hanya saja persoalan lembaga pemasyarakatan (Lapas) terkait *over capacity* dan *over crowded* harus menjadi perhatian seluruh aparat penegak hukum, tidak hanya bagi jajaran Kemenkumham. Ditambah adanya pandemi Covid-19, kelebihan kapasitas penghuni lapas ini tidak boleh tidak dianggap remeh.

“Masalah *over capacity* dan *over crowded*, harus menjadi perhatian. Ditambah lagi ada masalah lahan-lahan yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi,” ucap Adies usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI meninjau Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (14/10).

Ia menyatakan, mungkin perlu juga untuk mengurangi jumlah napi pengguna narkoba yang menghuni hampir 70 hingga 80 persen lapas. “Ini masalahnya memang harus ditangani oleh semua penegak hukum. Tidak bisa hanya bicara dengan Kemenkumham saja, ini kan bicara juga dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), tokoh agama, bicara dengan Polisi sebagai penyidik penuntut dan lain lain,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Adies untuk menyelesaikan persoalan *over capacity* dan *over crowded* lapas perlu ada pemikiran dari Kemenkumham, untuk dapat mengurangi para narapidana yang memang sudah harus dilepas atau yang pembinaannya sudah selesai untuk dapat segera dibebaskan.

Namun, hal tersebut diakuinya akan sulit terwujud mengingat dalam Peraturan Pemerintah tentang



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Foto: Nadya/OD

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tidak ada pengampunan bagi *extraordinary crime*, dan hal inilah yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

Sementara terkait dengan penerapan protokol Covid-19 di lapas, Adies menegaskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham harus memberikan perhatian lebih dan jangan pernah anggap remeh Covid-19. Ia menambahkan, sudah banyak penghuni lapas yang menjadi pasien atau bahkan korban Covid-19 yang mungkin saja tidak terekspos. Di Jawa Timur sendiri Adies menyebutkan ada sekitar 170 orang yang dilaporkan terinfeksi Covid-19.

“Nanti kita pulang (ke Jakarta), kami akan lakukan koordinasi kepada Dirjen PAS dan Kemenkumham kita mulai data lagi. Ini kan bagus Kanwilnya di sini. Bagus, beliau menganggapi ini semua kena Corona dulu. Semua diberi vitamin, semua protabnya sesuai dengan protap

Corona. Dan Alhamdulillah ini sudah mulai membaik. Kita ingin juga di daerah lain harus didata dengan baik dan benar, contohlah yang ada di Jatim,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Menurutnya, persoalan Covid-19 di lapas harus menjadi evaluasi mendalam. Pihak lapas harus memastikan protokol Covid-19 di lapas. Sehingga dapat dipastikan protokol tersebut dijalankan secara ketat dan disiplin agar dapat menekan laju penularan Covid-19 di lingkungan lapas.

“Sekarang kita mendengar warga binaan banyak yang terdampak, jangan sampai kemudian pegawai-pegawai lapas, termasuk sipir-sipir ikut terdampak. Kalau tidak hati-hati, maka bisa jadi pertahanan di lapas bisa terganggu, mengingat SDM di lapas tidak terlalu banyak, untuk itulah bahwa kejadian ini menjadi evaluasi mendalam buat lapas untuk betul-betul melakukan penataan ulang terkait protokol Covid yang ada di lapas,” tutupnya. ■ ndy/es

# Komisi V Tinjau Pembangunan Infrastruktur Jambi



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie memimpin Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur di Jambi. Foto: Singgih/OD

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menyampaikan, Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Jambi dalam rangka menginventarisir kebutuhan infrastruktur di Jambi serta untuk menyerap aspirasi terkait pembangunan infrastruktur dan perhubungan yang pembiayaannya melalui APBN.

“Maksud tujuan kami ke Jambi ini untuk melihat dan mendengar berkaitan dengan beberapa program-program infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Jambi terutama yang dibiayai oleh APBN,” ungkap Syarif usai pertemuan Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI dengan Pjs Gubernur

Jambi, di Jambi, Senin (12/10).

Syarief menambahkan, kunjungan ke Jambi ini juga untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur. Program pembangunan infrastruktur padat karya ini diharapkan dapat membantu dalam pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Pembangunan infrastruktur yang dibangun ini harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal di setiap daerah,” ungkapnya.

Syarief juga menyampaikan, masih ada hal-hal yang harus terus didorong dalam mempercepat pembangunan di Jambi. “Jambi ini kan memiliki 3 wakil Anggota DPR RI yang duduk di Komisi V DPR RI, 3 wakil inilah yang nantinya akan terus mendorong dan mengawasi

”

**YA KITA BERDOA MUDAH-MUDAHAN PANDEMI INI CEPAT SELESAI, SEHINGGA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BISA BERJALAN NORMAL KEMBALI**

percepatan pembangunan infrastruktur di Jambi,” ujar Syarif.

Politisi Partai NasDem ini menambahkan, walaupun di tengah pandemi yang masih melanda negeri ini, program-program infrastruktur tetap mengutamakan kepentingan keselamatan. “Ya kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, sehingga program-program pembangunan infrastruktur guna kesejahteraan masyarakat bisa berjalan normal kembali,” ujar legislator dari Kalimantan Barat I itu.

Sebagaimana diketahui, pada September 2020 yang lalu, Pemerintah dan DPR RI telah melakukan pembahasan APBN tahun anggaran 2021. “Kami meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas agar mempercepat pembangunan infrastruktur demi mendukung konektivitas dan ketahanan pangan di masyarakat,” tutup Syarif. ■ skr/sf



# Komisi V Pantau Proyek Pengendalian Banjir Kendari



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau lokasi kolam retensi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Foto: Erlangga/OD

**T**im Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memantau perkembangan proyek tiga Kolam Retensi untuk program pengendalian banjir daerah aliran Sungai Wanggu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Program ini diharapkan dapat menampung volume air Sungai Wanggu apabila terjadi hujan intensitas tinggi.

Hal tersebut disampaikan Ridwan usai berkeliling meninjau lokasi kolam retensi bersama tim anggota di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (12/10). Menurutnya, bencana banjir masih terus menjadi permasalahan Kota Kendari di saat musim penghujan. Terlebih, banjir di Kendari sering menimbulkan korban jiwa dan berdampak ekonomi.

“Untuk itu kami coba pahami dan carikan solusi. Dengan bekerja sama dengan Pemprov, minimal masyarakat yang sering dipindah-pindah karena

banjir tak terjadi lagi. Saya harap betul, tahun 2020 ini sudah bisa terlaksana utamanya tiga Kolam Retensi ini. Memang masih banyak kekurangan dari data dan desain, tapi saya pikir pemerintah mampu segera menyelesaikannya,” ucap Ridwan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, pembangunan kolam retensi akan berlangsung hingga 2023 nanti. “Dua kolam retensi akan dibangun di daerah Boulevard Kecamatan Baruga, yakni Kolam Retensi Hilir seluas 6 Ha, dan Kolam Retensi Tengah seluas 4 Ha. Sementara Kolam Retensi Hulu seluas 7,5 Ha akan dibangun di daerah Nanga-Nanga,” imbuh Ridwan lebih lanjut.

Ridwan juga menyarankan agar pemerintah kota dan pemerintah provinsi dapat segera menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan warga demi terwujudnya proyek tersebut. Sebab, menurutnya hal ini

yang akan menentukan kemaslahatan ekonomi bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Jadi dengan adanya urusan seperti ini, persoalan lahan ini, masyarakat juga pasti mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Saya kira wajar ini. Nah, untuk itu saya berharap Wali Kota dibantu Pemprov bisa mengambil langkah-langkah konkret dari sekarang untuk menyelesaikan persoalan ini tentu dengan cara yang benar,” tegas politisi dapil Sulawesi Tenggara ini.

Terkait dengan rencana pembangunan Kolam Retensi untuk Sulawesi Tenggara, pemerintah telah merencanakan sebuah sistem yang menggambarkan satu sungai induk di Kota Kendari yakni Sungai Wanggu yang kemudian akan memiliki 14 anak sungai. Sejauh ini, progresnya sudah lebih dari 80 persen dan diharapkan dapat selesai secepatnya guna mengakhiri permasalahan bencana banjir. ■ er/es

# BUMN Pengelola Candi Diminta Berinovasi Sambut Pasca Pandemi



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima saat memimpin pertemuan dengan jajaran Direksi PT. TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Pesero) di DI Yogyakarta. Foto: Ria/OD

**T**erbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi Covid-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Tak terkecuali Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang dikelola oleh BUMN pun turut terdampak.

Melihat hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menanyakan rencana strategis PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Pesero) di masa pandemi Covid-19, serta strategi pemasaran yang disiapkan pasca pandemi. “Kita ingin melihat dampak Covid-19, serta skenario yang dibuat BUMN agar sektor pariwisata yang dikelolanya bisa bangkit, baik di masa pandemi maupun pasca pandemi,” ungkapnya usai memimpin pertemuan dengan jajaran Direksi PT. TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Pesero) di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Jumat (9/10).

Menurut Aria Bima, PT. TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko perlu membuat rencana strategi pemasaran pasca pandemi Covid-19. Pemasalnya, setelah 300 juta vaksin didistribusikan di awal tahun 2021 nanti, diperkirakan sektor pariwisata akan kembali bergairah. “Setelah berbulan-bulan di rumah, pasti akan banyak wisatawan yang butuh *refreshing*. Momentum ini harus dimanfaatkan. Perlu ada inovasi serta kreativitas dalam mengembangkan potensi yang ada agar sektor pariwisata dapat kembali bergairah bahkan melampaui keadaan sebelum Covid-19 menyerang,” katanya.

Jika pariwisata hidup kembali, lanjut Aria Bima, secara tidak langsung akan membawa dampak positif terhadap masyarakat di sekitar. “Industri pariwisata juga mencakup industri penunjang lainnya seperti perhotelan, restoran, angkutan (darat, laut dan udara) dan produk-produk industri, IKM, UMKM, koperasi dan perbankan lainnya

akan turut berdampak, maka ini perlu dipersiapkan,” papar politikus PDI Perjuangan itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Ia menyampaikan, Komisi VI DPR RI sangat konsen dengan banyaknya BUMN yang saat ini terdampak Covid-19. Salah satu yang sangat terpukul adalah sektor pariwisata.

“Aset pariwisata milik Indonesia yang mendatangkan devisa harus dikelola secara tepat. Untuk itu, kami (Komisi VI) meminta PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko menggali dan membuat suatu strategi yang tepat baik saat pandemi hingga persiapan pasca pandemi. Tujuannya agar menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara,” katanya.

Sebelumnya, dalam paparannya, Direktur Utama PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Edy Setijono mengatakan, setelah tiga bulan ditutup karena pandemi, taman wisata candi kembali dibuka bulan Juni kemarin, dengan menerapkan protokol kesehatan di destinasi yaitu *clean*, *healthy* dan *safety*.

Edy juga mengungkapkan, pihaknya membatasi jam operasional taman wisata candi. Waktu kunjungan dibuka dari pukul 08.00-16.00 WIB. Dalam kurun waktu tersebut dia juga menyebutkan ada jeda istirahat selama 1 jam yang akan digunakan untuk membersihkan semua peralatan protokol kesehatan yang telah digunakan oleh wisatawan.

Pembatasan jumlah pengunjung juga dilakukan, biasanya sebelum pandemi sekita empat juta pengunjung per hari, namun di masa pandemi hanya 3.500 pengunjung per hari. ■ rnm/es



# Industri Kreatif Bali Jadi Potensi Bisnis Masa Depan

**W**akil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengapresiasi pelaku industri kreatif di Bali dalam menghasilkan proyek *startup*, seperti aplikasi *guiding* (wisata) serta sejumlah proyek di sektor kepariwisataan lainnya. Menurutnya, hal itu merupakan suatu potensi yang inovatif dan menjanjikan dalam bisnis masa depan.

“Terutama saya lihat itu sudah ada beberapa aplikasi, utamanya untuk kepentingan wisata, ada saya melihat itu wisata desa, saya melihat itu ada *guiding online*, jadi sangat sangat kreatif mereka,” ujar Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses

Komisi VI DPR ke Bali Creative Industry, Denpasar, Bali, Rabu (14/10).

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, industri kreatif merupakan bisnis yang menjanjikan dan sudah terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi. Terlebih, Bali merupakan pusat dari sektor industri kreatif yang terkena dampak cukup parah oleh pandemi Covid-19. Dimana, Bali memiliki penurunan pertumbuhan dua kali lipat dari rata-rata nasional.

Demer berharap Bali bisa menjadi seperti Silicon Valley di Amerika Serikat. “Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi seperti Silicon Valley, Amerika. Ya Bali ini kalau ada di Amerika mungkin ada di Bali tentang

industri kreatif itu sendiri. Kami melihat mereka sangat kreatif. Mereka telah menghasilkan beberapa *startup* yang menghasilkan juga beberapa proyek yang mereka lakukan secara inovatif dan kreatif,” pungkash Demer.

Dalam hal ini, legislator dapil Bali ini juga menyampaikan, Komisi VI DPR RI akan mendorong kebijakan maupun anggaran, sehingga pelaku industri kreatif lebih leluasa berinovasi dan berkreaitivitas. “Saya berharap dengan kita berkunjung ke (Bali) sini, kita lebih mendorong kepada kebijakan-kebijakan maupun anggaran untuk mereka bisa lebih leluasa lagi dalam melakukan inovasi maupun kreativitasnya,” harapnya. ■ srw/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih memimpin Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau produk yang dihasilkan Bali Creative Industry, Denpasar, Bali. Foto: Fitri/OD

# Komisi VII Pantau Kesiapan Pertamina dan PLN Dukung Operasionalisasi Bandara Soetta

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI memantau kesiapan PT. Pertamina (Persero) dalam memenuhi permintaan avtur untuk operasionalisasi maskapai-maskapai di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, di tengah dampak pandemi Covid-19. Komisi Energi ini juga ingin mengetahui keandalan PT. PLN (Persero) dalam menyuplai pasokan listrik untuk mendukung beroperasinya Bandara Soetta saat melayani penumpang.

“Sudah didengar bahwa permintaan avtur menurun, tapi *supply* juga tetap terjaga bahwa berapapun nanti *demand*-nya naik, *supply* akan dijaga, jadi aman. Dan saat ini, seperti yang disampaikan (Direksi Pertamina), jadi Pertamina pada saat pesawat sepi seperti ini, digunakan untuk beres-beres (kinerja) mana yang perlu dibereskan,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan Direksi Pertamina dan PLN di Tangerang, Banten, Jumat (9/10).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, dalam pertemuan yang turut dihadiri jajaran Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Ditjen Ketenagalistrikan KESDM, BPH Migas, Kepala DPPU Pertamina Aviation Soetta, dan Kepala PLN Gardu Induk Cengkareng itu, PLN memastikan pasokan listrik untuk Bandara Soetta terjamin. Sehingga, dipastikan tidak akan pernah terjadi lagi pemadaman seperti dulu.

“Keandalan (PLN) dalam *supply* listrik untuk bandara itu kan berkedip pun tidak boleh, apalagi (listrik) padam. Sudah dikatakan aman, ada beberapa penyulang yang mensuplai listrik untuk



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin bersama Tim Kunker Komisi VII DPR RI bertukar cenderamata dengan Direksi Pertamina dan Direksi PLN di Tangerang, Banten. Foto: Sofyan/OD

bandara ini, jadi tingkat keandalannya terjamin. Dan untuk Pertamina, dikatakan bahwa *demand* menurun, tapi tidak ada PHK (karyawan) karena kilang itu tetap berfungsi minimal, jadi memperkecil kerugian,” tandas legislator dapil Sumatera Selatan II itu.

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menilai, dengan adanya penurunan permintaan avtur dalam negeri sekaligus untuk mengantisipasi kerugian Pertamina, ia menyarankan agar mencari pasar baru untuk distribusi avtur. Salah satunya ke luar negeri. Apalagi dalam pertemuan terungkap, Pertamina juga menjual avturnya ke sejumlah negara, seperti Tiongkok, Thailand, Jepang, dan beberapa negara lainnya.

“Bagaimana supaya Pertamina tidak rugi, karena bagaimanapun sudah diproduksi salah satunya ya tentunya Pertamina harus siap mencari pasar lagi di luar negeri untuk wilayah-wilayah yang sudah membuka *lockdown*-nya. Sudah

banyak ya negara-negara yang sudah buka *lockdown*, artinya penerbangan sudah bisa dilakukan. Pertamina harus bisa menjualnya (avtur) ke luar, karena kalau kita ke pasar dalam negeri, selain pandemi Covid-19 juga ada masalah soal daya beli masyarakat yang mengalami penurunan,” papar politisi F-PAN ini.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II itu mendorong Pertamina untuk dapat menjual avtur ke luar negeri. Namun menurutnya semua kembali kepada kemampuan Pertamina untuk bernegosiasi dengan *buyer-buyer* yang ada di luar negeri. Pasalnya sejumlah negara juga memiliki penerbangan domestik yang besar, sehingga menjadi potensi bagi Pertamina. “Artinya, jangan sampai kita kalah dengan produsen-produk dari negara lain di dalam kemampuan untuk bernegosiasi. Tentunya tidak harus dijual murah dengan harga yang sesuai sebelum pandemi Covid-19,” pesan Andi. ■sf



# Komisi VII Soroti Pemadaman Listrik di Tegal

**K**omisi VII DPR RI memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh PT. PLN Tegal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kota Tegal, Jawa Tengah, walaupun di samping itu, Komisi VII DPR RI menemukan kendala di dalamnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan, pihaknya mendapati aspirasi masih sering terjadinya pemadaman listrik di Tegal.

“Kita (Komisi VII DPR RI) sebagai Anggota DPR RI juga punya sumber-sumber penyaluran aspirasi masyarakat. Nah dari sini dikatakan bahwa di Jawa Tengah ini, khususnya Tegal, masih sering terjadi pemadaman listrik, bahkan hingga ke daerah di desa-desa,” ungkap Ramson usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan jajaran PLN

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tegal, di Gardu Induk Kebasen, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/10).

Komisi VII DPR RI pun meminta penjelasan kepada PT. PLN Tegal terkait adanya pemadaman listrik. Sebab, menurut Ramson, di Jateng, khususnya Tegal memiliki Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen. Artinya, dengan total beban puncak sebesar 4.473 Megawatt (MW), maka terdapat cadangan pasokan listrik sebesar 4.566,72 MW untuk Jateng.

“Dikarenakan Tegal merupakan pusat bisnis yang strategis, maka tentunya pasokan listrik untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan di wilayah Tegal, selain tentunya kebutuhan listrik rumah tangga, harusnya pasti akan selalu meningkat,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Komisi VII DPR RI pun meminta kepada jajaran PT. PLN (Persero), baik Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tegal maupun PLN Pusat untuk segera mencari solusi terkait pemadaman listrik di Tegal. Juga, Ramson berpesan, agar PLN dapat terus mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di masa yang akan datang baik melalui perluasan jaringan PLN maupun pembangunan pembangkit listrik.

Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali PLN Haryanto WS menjelaskan bahwa pemadaman listrik tersebut terjadi dikarenakan adanya penggantian trafo, *reclouser*, pemasangan Sambungan Rumah (SR) dan Alat Pengukur dan Pembatas (APP), serta faktor teknis lainnya. ■ hnm/sf



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian beserta Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI foto bersama jajaran PLN Tegal dan mitra kerja. Foto: Hanum/OD

# Komisi VIII Salurkan BOP Pesantren di Kaltim

**K**omisi VIII DPR RI menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 1,3 miliar kepada 52 Pondok Pesantren yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan secara simbolik diserahkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus kepada Pimpinan Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan.

“Dana tersebut merupakan alokasi dan *refocussing* Covid-19 untuk kita salurkan langsung kepada pesantren-pesantren. Dana BOP itu nanti bisa dipakai untuk keperluan murid-murid, untuk listrik, air, gaji guru-guru ngaji, dan juga APD (Alat Pelindung Diri),” kata

Ihsan sesaat setelah penyerahan BOP di Asrama Embarkasi Haji Balikpapan, Kaltim, Jumat (9/10).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, BOP kepada pesantren tersebut merupakan tahap kedua

”

**DANA BOP ITU NANTI BISA DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN MURID-MURID, UNTUK LISTRIK, AIR, GAJI GURU-GURU NGAJI, DAN JUGA APD**

untuk penyalurannya di tahun ini. Ihsan mengimbau penggunaan dana tersebut dapat terus bisa diawasi dengan benar, karena tidak boleh ada potongan untuk penyaluran dana-dana tersebut.

“Saya sudah mengimbau kepada Pak Gubernur dan *stakeholder* terkait agar dana tersebut tidak boleh ada potongan sedikitpun. Agar terus diawasi dengan cermat, dan digunakan dengan tepat,” tutur legislator dapil Jambi itu. Selain Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, turut hadir menyaksikan penyerahan BOP tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kaltim Sofyan Noor. ■ azk/sf



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyalurkan BOP kepada 52 Pondok Pesantren di Kalimantan Timur. Foto: Azka/OD



# Komisi VIII Dorong Pembukaan Aktivitas Belajar Pesantren di Zona Hijau



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Tim Kunjuran Komisi VIII DPR RI meninjau Ponpes di Sumut. Foto: Puntho/OD

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong Pemerintah, secara khusus dalam hal ini Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk membuka kembali aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren (ponpes). Adapun, syaratnya ponpes wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta telah berada di zona hijau (zona aman dari pandemi Covid-19).

Pemaparan tersebut disampaikan Marwan usai memimpin Tim Kunjuran Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumut

Syahrul Wirda, Ketua MUI Provinsi Sumut Prof. Abdullah Syah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumut Maratua Simanjuntak dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumut, di Medan, Jumat (9/10).

“Di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat-saat ini, hanya pesantren yang menjadi tumpuan untuk pendidikan. Mengingat, sekolah-sekolah lain melakukan pendidikan dengan sistem daring. Komisi VIII meminta agar pesantren di zona hijau tidak ditutup, sebab kalau ditutup akan terjadi *lost generation*,” ujar Marwan.

Oleh karena itu, politisi Fraksi PKB tersebut meminta pemerintah untuk

hadir semaksimal mungkin dalam rangka melindungi pesantren agar tidak terpapar Covid-19. Marwan mengusulkan, negara harus memberikan vitamin kepada santri dan pengelola pesantren agar imunitas santri dan pengelola pesantren menjadi kuat.

“Jika ponpes berada dalam peta zona hijau, tinggal pemerintah untuk memastikan supaya lingkungan pesantren tetap sehat. Selain adanya protokol kesehatan, pemerintah wajib hadir menganggarkan vitamin untuk membantu menguatkan stamina kepada tiap santri dan pengelola pesantren. Tambah vitaminnya, pemerintah hadirilah,” pungkas legislator dapil Sumut II itu. ■ pun/sf

# Komisi IX Apresiasi Pemprov Jateng Atasi Covid-19



Tim Kunker Komisi IX DPR RI dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene foto bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Husen/OD

**K**omisi IX DPR RI mengapresiasi penanganan wabah virus Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Dimana, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kerap turun langsung menangani penyebaran Covid-19 ke pesantren-pesantren dan desa-desa.

Apresiasi ini disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, usai menggelar pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Jateng di Semarang, Kamis (8/10). Banyak terobosan yang telah dilakukan Pemprov Jateng dalam menekan angka pasien positif Corona. Di

”

**SAYA MENGAPRESIASI PEMERINTAH JAWA TENGAH KARENA TEROBOSAN-TEROBOSAN YANG DILAKUKAN**

antaranya membatasi kehadiran para santri di pesantren yang bisa menjadi pusat kluster penyebaran virus.

“Saya mengapresiasi Pemerintah Jawa Tengah karena terobosan-terobosan yang dilakukan. Ini tinggal kesadaran masyarakat sendiri. Pak

Gubernur sudah sering turun ke lapangan. Banyak hal yang sudah dilakukan. Bahkan, pemerintah Jateng telah menyiapkan anggaran APBD untuk membenahi perekonomian masyarakat yang terdampak,” ungkap politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

Legislator dari Sulawesi Utara ini berharap agar daerah lain mencontoh apa yang sudah dilakukan Pemprov Jateng tersebut. Pembatasan sosial memang dilakukan di beberapa daerah, namun perdagangan secara *online* terus berjalan. Selain itu, Pemprov Jateng juga sudah menyediakan 58 rumah sakit rujukan untuk menampung para pasien terinfeksi virus Covid-19. ■ mh/es



# Komisi IX Minta Kemenkes Penuhi Kebutuhan TCM di RSUD Kota Serang

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan satu mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) kepada RSUD Kota Serang. Hal ini dikatakannya setelah mendapat informasi bahwasanya RSUD Kota Serang belum memiliki alat untuk menguji hasil tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Covid-19. Selama ini, pemeriksaan sampel hasil uji dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Banten.

“Tolong diberikan satu alat TCM untuk Kota Serang, agar tidak perlu dikirim ke Provinsi. Kendala pemeriksaan sampel hasil test PCR, harus segera diatasi agar hasilnya dapat cepat diketahui. Mohon untuk dicatat oleh Kementerian Kesehatan yang mendampingi kunjungan kerja

kami,” pintanya kepada perwakilan Kementerian Kesehatan yang turut mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR RI saat pertemuan dengan Wali Kota Serang Syafrudin Syafei beserta jajaran, di Serang, Banten, Kamis (8/10).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, adanya TCM akan sangat membantu RSUD Kota Serang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun TCM ini sangat *basic* sekali, tapi sangat mudah untuk dilakukan. “Seharusnya rumah sakit untuk setingkat kota atau kabupaten sudah memiliki satu atau dua alat ini,” tegasnya.

Mendengar hal tersebut, Wali Kota Serang Syafrudin Syafei mengucapkan terima kasih kepada tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI sembari berharap alat TCM dapat segera diterima RSUD Kota Serang.

“Terima kasih, semoga dapat cepat mendapatkan alat tersebut guna mengatasi kendala yang kami hadapi RSUD Kota Serang,” ucap Syafrudin.

Sebelumnya, Syafruddin memaparkan, Kota Serang sejak mulai pandemi Covid-19 merupakan wilayah dengan zona oranye, tercatat jumlah kasus positif 288 orang, 25 orang masih dirawat, 9 meninggal, dan 125 sembuh, sisanya melakukan isolasi mandiri.

Kemudian bagi pasien Covid-19 yang memerlukan penanganan intensif, akan dirujuk ke RS Darajat di Provinsi Banten. Karena RS di Kota Serang hanya menangani pasien dengan gejala ringan dan sedang. Pemerintah Kota Serang saat ini telah mempersiapkan fasilitas isolasi di Rusunawa yang ada di Kota Serang dengan kapasitas 500 tempat tidur, untukantisipasi lonjakan kasus pasien terinfeksi Covid-19. ■ sc/es



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat pertemuan dengan Wali Kota Serang Syafrudin Syafei beserta jajaran. Foto: Sucl/OD

# Komisi X Dukung Pemulihan Pariwisata di Tengah Pandemi

**K**omisi X DPR RI mendukung upaya pemerintah daerah memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti bertolak ke Kota Semarang, Jawa Tengah guna menggali, menyerap aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah, termasuk pemulihan pariwisata di tengah pandemi Covid-19.

“Di tengah pandemi Covid-19, kondisi pariwisata Indonesia sangat terpuruk. Kami perlu mendapatkan gambaran dan data mengenai kondisi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Semarang ini, termasuk gambaran mengenai program-program jaringan pengaman sosial serta bantuan keringanan pajak dan listrik bagi industri pariwisata. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemda dan organisasi pariwisata dalam mendukung pemulihan pariwisata dan penguatan ekraf,” kata Agustina di Kantor Wali Kota Semarang, Jateng, Kamis (8/10/).

Dalam periode masa sidang ini, Komisi X DPR RI bersama salah satu mitra kerjanya, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyepakati anggaran tahun 2021 sebesar Rp 4,377 triliun yang ditujukan untuk percepatan pemulihan pariwisata, membuat pariwisata dan ekonomi kreatif berkualitas, serta digitalisasi dan kedaulatan digital. “Untuk itu selain Panja Peta Jalan Pendidikan, saat ini Panja Penguatan Ekraf sedang bekerja,” lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Semarang tersebut.

Dampak dari pandemi Covid-19, jika menilik data Kemenparekraf per April 2020, terdapat sedikitnya 1.500 hotel dan akomodasi tutup sementara. Sejumlah restoran dan rumah makan mengalami



Tim Kunker Komisi X DPR RI berkunjung ke Kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah. Foto: Alfiel/OD

penurunan omset mencapai 70 persen, hingga tutupnya 36 cabang *brand food and beverages* (F&B). Belum lagi berbagai destinasi wisata dan tempat hiburan tutup sementara, serta 39 *event MICE* yang ditunda. Berbagai wahana rekreasi juga mengalami 90-100 persen penurunan, 84 persen industri *event* dibatalkan dan sisanya ditunda. Data terakhir, 94,1 hingga 100 persen biro perjalanan alami penurunan.

Untuk itu, lanjut Agustina, Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI telah menghasilkan sejumlah rekomendasi. Pertama, mendorong pelaku pariwisata memaksimalkan fase *new normal* dengan memberikan pelayanan terbaik dan aman untuk mendorong perjalanan/pergerakan wisatawan nusantara ke destinasi-destinasi wisata yang telah dibuka. Kemudian, mendorong pelaku pariwisata untuk aktif memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemda, serta turut mensosialisasikan protokol perjalanan wisata di masa *new normal*.

“Seperti kita ketahui, Kota Semarang ini potensi pariwisata dan

budayanya cukup unik. Karakter ini muncul dalam bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Kearifan lokal Semarang merupakan potensi lokal yang berbentuk tatacara, nilai, norma, aturan, arsitektur bangunan serta tradisi seni dan budaya. Budaya masyarakat dipengaruhi oleh berbagai unsur, di antaranya China, Arab, Jawa dan Belanda yang terlihat dari bangunan sejarah yang berdiri di Kota Semarang. Bangunan tersebut menjadi daya tarik wisata di Kota Semarang,” pungkas Agustina.

Kunker Komisi X DPR RI ke Kota Semarang diikuti Pimpinan dan sejumlah Anggota lainnya, di antaranya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (F-PKS), Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayanti dan Putera Nababan dari F-PDI Perjuangan, Mujib Rohmat dan Robert Joppy Kardinal dari F-Golkar, Djohar Arifin Husin dan Ali Zamroni dari F-Gerindra, Tina Nur Alam (F-NasDem), Bisri Romli (F-PKB), Yoyok Sukawi dan Bramantyo Suwondo dari F-Demokrat, Fahmi Alaydroes (F-PKS), dan Desi Ratnasari (F-PAN). ■ alw/sf



# Pengembangan Pariwisata dan Ekraf Harus Beriringan

**K**etika pemerintah melakukan pengembangan di sektor pariwisata, tidak bisa hanya sebatas urusan lingkungan, pemandangan, atau *view* semata, namun juga ada sektor yang tak boleh terlupakan yaitu ekonomi kreatif (ekraf). Sangat banyak produk ekraf yang bisa menunjang sektor pariwisata seperti kerajinan, makanan yang bisa dijadikan buah tangan. Untuk itu, kedua sektor ini harus selalu berjalan beriringan.

Hal ini menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Gresik, Jawa Timur, Kamis (8/10). “Seringkali itu (ekraf) terlupakan. Tempat wisatanya sudah bagus, tapi kemudian industri pendukungnya kurang bagus. Misalnya makanannya

”

**SELAIN TURUT MENDONGKRAK PEREKONOMIAN MASYARAKAT LOKAL, PENDAPATAN NEGARA PUN AKAN MENINGKAT**

kurang higienis, aneka ragam masakannya juga tidak menarik minat pengunjung. Harus beriringan antara pariwisata dan ekraf,” ucapnya.

Ia menilai, sinergi antar keduanya saat ini masih belum tampak. Pariwisata dan ekraf kerap kali terlihat jalan masing-masing. Hal ini tentu saja membuat adanya kekosongan yang

seringkali diisi oleh pihak luar. “Yang terjadi akhirnya apa? Ya itu tadi, oleh-oleh itu datangnya dari luar negeri. Seperti yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu yang sempat heboh.

Jadi ada ruang kosong yang belum dioptimalkan,” ucap Nur Purnamasidi.

Meskipun secara kelembagaan pariwisata dan ekraf sudah menjadi satu, tapi irama keduanya masih belum padu. Ia mencontohkan salah satu program kepariwisataan yaitu program Bersih, Indah, Sehat, Aman (BISA). “Misalnya bersih-bersih sampah. Kemudian sampah itu cuma dikumpulkan. Coba kalau ada ekraf-nya, setelah sampah dikumpulkan, diolah menjadi industri olahan baru, misalnya dari plastik menjadi tas, kemudian menjadi oleh-oleh bagi wisatawan,” ujarnya mencontohkan.

Dari sisi regulasi, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini sudah cukup. Namun memang harus ada *will*-nya antara mereka yang bergerak di bidang pariwisata juga ekraf. “*Chemistry* antara kedua sektor tersebut dinilai masih belum nyambung. Itu *chemistry*-nya belum nyambung. Kami bisa lihat, ketika rapat-rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, pariwisatanya ke kanan, ekrafnya ke kiri. Belum ada program bersama yang mensinergikan kedeputian pariwisata dengan kedeputian bidang ekraf,” ungkap Nur Purnamasidi.

Ia berharap sekali agar kedua sektor tersebut terus meningkatkan sinergi. Selain turut mendongkrak perekonomian masyarakat lokal, pendapatan negara pun akan meningkat. “Kalau tidak, ya itu tadi. Capaian-capaian yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai menyumbang terbesar devisa secara nasional akan sulit untuk kita capai,” pungkasnya. ■ es



Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi. Foto: Erman/OD

## Pemda Kuningan Diimbau Miliki RIPPDA

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, mungkin kurang dikenal di kalangan wisatawan, padahal Kuningan memiliki banyak potensi pariwisata yang luar biasa yang bisa dikembangkan, seperti desa wisata. Untuk itu, ia mengimbau Pemkab Kuningan memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Hetifah menjabarkan. Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan informasi langsung potensi pariwisata di Kuningan. Karena, pemerintah pusat sendiri tidak menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai prioritas, misalnya untuk mendapatkan dana alokasi khusus di bidang pariwisata. Jadi inilah yang



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama pelaku ekraf di Kuningan. Foto: Arief/OD

mungkin menjadi masukan bagi DPR RI agar ke depan potensi yang dimiliki Kuningan harus di-support melalui berbagai program.

“Alhamdulillah pemerintah cukup punya rencana yang bagus dan mudah-mudahan untuk tahun 2021 ke depan potensi desa wisata bisa dikembangkan, di-support dan difasilitasi,” kata Hetifah usai pertemuan dengan Bupati Kuningan beserta jajaran di Kantor Bupati Kuningan, Jawa Barat,

Kamis (8/10).

Selain itu, menurut Hetifah, sektor pendidikan di Kuningan juga perlu mendapatkan support supaya sumber daya manusianya memiliki pola pikir yang maju tambah maju untuk mengembangkan daerahnya. “Kita ingin ke depan pendidikan di Kuningan mendapat dukungan, seperti sekarang mereka memiliki program revitalisasi sekolah dan diharapkan agar semua wilayah bisa tersentuh,” katanya. ■ afr/es



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. Foto: Andri/OD

**S**istem transaksi keuangan digital merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari di era saat ini. Bank Indonesia melalui QRIS (QR Code Indonesia Standard), harus gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat serta mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

## Majukan UMKM, Sosialisasi QRIS Harus Dimaksimalkan

(UMKM) untuk bergabung ke dalam sistem QRIS Bank Indonesia. Dengan menyatukan seluruh QR Code yang digunakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSJP), pelaku UMKM dan pelanggan bisa merasakan manfaat praktisnya secara langsung.

“UMKM tidak perlu menyediakan banyak QR Code PSJP di atas meja kasirnya, *costumer* juga tidak perlu men-download banyak PJSP di *handphone*. Misalnya, pelanggannya pengguna dana sementara *outlet*-nya hanya punya satu Gopay, OVO, e-Money atau alat pembayaran yang lainnya itu kan kendala transaksi,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (12/10).

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menjelaskan, salah satu kerangka kebijakan BI selama pandemi yaitu memfasilitasi transaksi UMKM dengan menerapkan tarif biaya penggunaan sistem QRIS sebesar 0 persen bagi pelaku UMKM hingga tanggal 31 Desember 2020. Selain sosialisasi, BI harus melakukan pendampingan terhadap para pemilik UMKM yang bergabung ke dalam sistem QRIS.

Pendampingan yang dimaksud termasuk pembekalan penentuan PJSP, yang mana bisa berupa Bank atau Non-Bank. Ada banyak PJSP yang sudah berada di bawah pengawasan BI, salah satu contoh PJSP Bank yang terkenal di kalangan masyarakat adalah Jenius oleh Bank BTPN, dan GoPay dan OVO untuk PJSP Non-Bank. ■ man/sf



# Komisi XI Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah



Tim Kunker Komisi XI DPR dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto foto bersama Gubernur Jawa Tengah dan mitra kerja. Foto: Tiara/OD

**K**etua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mendorong dilakukannya langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk percepatan pembangunan ekonomi kawasan di provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang.

“Diperlukan strategi yang tepat, memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, dan terukur guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat sosial ekonomi (*multiplier effect*) bagi masyarakat di sekitarnya,” ungkap Dito

usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/10).

Untuk itu legislator Partai Golkar ini meminta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah. Juga PT. SMI (Persero) yang merupakan salah satu *Special Mission Vehicles (SMV)* yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur, untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah.

“Terkait dengan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah tersebut maka diperlukan skema pendanaan yang didukung oleh PT. SMI dan penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh PT. PII dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019,” jelas Dito.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam paparannya menyebutkan skenario yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yakni dengan cara, mendorong investasi industri strategis, pembangunan infrastruktur, penguatan SDM, mendorong ekspor-TPT, substitusi impor, dan pengembangan sektor pariwisata.

“Penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 ini sejalan dengan skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tinggi, menyebar, dan inklusif, dalam hal ini Pemprov Jawa Tengah meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional. Untuk itu Pemprov Jawa Tengah mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan delapan kawasan prioritas yang berbasis kerja sama regional,” jelas Ganjar. ■ tra/es

# Komisi XI Dorong Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu

**K**omisi XI DPR RI mengharapkan agar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana dengan baik agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian secara nasional.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI meninjau progres pembangunan proyek infrastruktur strategis Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) di Cileunyi, Jawa Barat, Senin (12/10).

“Jawa Barat merupakan satu daerah penyangga ibu kota. Proses pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat menjadi proses yang penting juga buat ibu kota. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menjadi sangat penting bagi proses pertumbuhan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Eriko.

la menyatakan, pertumbuhan ekonomi ini bisa terjadi kalau didukung dengan fasilitas dan sarana penunjangnya seperti bandara dan pelabuhan, yang membuat transportasi untuk pengiriman barang, logistik serta pengiriman hasil produksi dari semua hasil industri yang ada di Jawa Barat ini bisa tersampaikan dengan baik ke tujuannya.

“Tanpa adanya jalan tol yang menghubungkan bandara atau pelabuhan ke sentra-sentra industri yang ada di Jawa Barat ini maka tidak mungkin hal itu (pertumbuhan ekonomi) akan terjadi dengan baik. Oleh karenanya, kami ingin melihat sejauh mana perkembangannya. Kalau melihat situasi yang ada di sini, kami optimis, namun kami juga ingin percepatan yang terjadi bisa lebih dari yang seharusnya,” tandasnya.

Dalam perhitungan, tambah Eriko, akhir tahun 2021 Jalan Tol Cisumdawu sudah bisa beroperasi. “Tetapi kami berharap prosesnya dapat lebih cepat. Bahkan bila dimungkinkan, pada pertengahan tahun

depan (sudah bisa digunakan). Dengan begitu proses pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa lebih cepat juga,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Eriko menegaskan, Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan sentra industri dan juga sentra pertanian yang sangat penting. “Untuk itu Komisi XI DPR RI ingin mengetahui sejauh apa perkembangannya yang ada di sini. Apabila ada permasalahan tentu kami bisa membantu untuk menyelesaikan,” tutur legislator dapil DKI Jakarta II itu.

Menurutnya, berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, semuanya sudah berjalan dengan relatif baik. “Namun kami meminta untuk adanya percepatan. Komisi XI DPR RI sepakat untuk meminta kepada semua *stakeholder* yang ada, untuk mempercepat paling tidak sebelum akhir tahun depan sudah dapat selesai secara keseluruhan dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum dan juga perkembangan industri,” pungkas Eriko. ■ ep/es



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga saat memimpin Tim Kunker Komisi XI DPR RI meninjau progres pembangunan proyek Jalan Tol Cisumdawu. Foto: Dep/OD





Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI meninjau lokasi PLTP PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha di Ciwidey, Provinsi Jawa Barat. Foto: Runi/OD

# Komisi VII Tinjau Operasionalisasi PLTP Patuha

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha di Ciwidey, Provinsi Jawa Barat, Jumat (9/10). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan, pihaknya ingin mendengarkan penjelasan mengenai operasionalisasi PLTP Unit Patuha, sekaligus rencana pengembangan PLTP Patuha Unit II pada tahun 2023.

“Dijelaskan dari segi pendanaan (PLTP Patuha Unit II) sudah siap dengan nilai investasinya cukup besar, yakni 179 juta dollar Amerika Serikat. Teknologi yang akan digunakanpun sudah siap mencapai 75 persen, saya kira ini sudah standar yang baik, bahkan kami akan dorong ini bisa mencapai 80 persen,” harap Eddy. Masih dalam rangkaian kegiatan, Tim Kunker Komisi VII DPR RI juga meninjau sejumlah lokasi dan melihat secara langsung proses dan cara kerja pengelolaan energi panas bumi di PLTP Patuha.

“Menurut saya ini sudah sangat baik dan kami mendukung peroyek pembangunan (PLTP Patuha) tahap II dalam rangka mengembangkan dan membangkitkan energi terbarukan di Indonesia dengan baik. Saya kira *geothermal* merupakan alternatif yang terbaik, karena sumber daya yang dihasilkan sangat melimpah. Yang terpenting sekarang kita pikirkan bagaimana bisa mengembangkan energi panas bumi ini secara baik,” ungkap politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu.

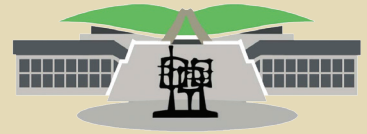
Lebih lanjut Eddy menyampaikan, dari hasil kunjungan ini, pihaknya mendapatkan banyak masukan serta berbagai tantangan yang dihadapi PLTP Patuha. “Tak hanya masukan saja yang kami dapat, berbagai macam hambatanpun disampaikan. Seperti tarif eksplorasi *geothermal* yang memakan biaya besar. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI mendorong agar eksplorasi dibiayai oleh negara. “Jika ini bisa dibiayai oleh negara, tidak menutup kemungkinan akan lebih

mendatangkan investor untuk masuk ke sektor *geothermal*,” saran Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) F.X. Sutijastoto, mengatakan, Pemerintah dan DPR RI bertekad agar Indonesia segera mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih ke EBT (Energi Baru Terbarukan) yang bersih serta ramah lingkungan, seperti panas bumi atau *geothermal*.

Terkait rencana PLTP Patuha Unit II, PT. Geo Dipa Energi menggelontorkan investasi sebesar 179 juta dollar AS. Berdasarkan rencana pengembangan, PLTP Patuha Unit II akan *Commercial Operation Date* (COD) atau beroperasi komersial tahun 2023 dengan kapasitas 55 MegaWatt (MW). Sementara PLTP Patuha Unit 1 telah beroperasi secara komersial sejak 22 September 2014, dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 55 MW dan menelan investasi sebesar 165 juta dollar AS. ■ rni/sf





Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin (hadir secara virtual), Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan jajaran menghadiri pencanangan E-Parlemen yang diadakan Protokol Setjen DPR RI, di Gedung Nusanantara, Senayan, Kamis (8/10). Foto: Djazuli/OD



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyerahkan draf final UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo, melalui Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman, di Kantor Kemensetneg, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/10). Foto: Ojji/OD



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik Inosentius Samsul, sebagai Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI di Ruang Pustakaloka Gedung Nusanantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10). Foto: Ojji/OD

